

Optimalisasi Kinerja Bumdes “Sumber Lancar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dongko

Muhammad Frengki¹, Muhammad Zulfian Surya Pratama², Binsar Setiawan Manurung³, Wiwin Yulianingsih⁴

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur
60294

Telepon: (0623) 18706369

E-mail: 20071010085@student.upnjatim.ac.id¹, 20071010090@student.upnjatim.ac.id²,
20071010092@student.upnjatim.ac.id³, wiwiny.ih@upnjatim.ac.id⁴

Abstract

Strategies to make an improvement in the welfare and quality of life in the community require synergy from various parties, especially the village government in ensuring the needs of its citizens. Efforts that can be taken to realize these goals are through BUMDes. This study aims to discover what kind of effort to optimize the performance of BUMDes in increasing village revenue through good Standard Operational Procedures (SOP), based on the needs of the community of Dongko village. This study using scientific qualitative method with descriptive approach and the acquisition of data using observation of Dongko village, interviews and documentation of the activities of BUMDes. Based on the analysis of problem identification, there are internal factors and external factors that hinder the effectiveness of BUMDes so that efforts can be applied by maximizing Standard Operational Procedures and accompanied by the availability of competent human resources, preparing good marketing strategies, improving effective management systems so that BUMDes can run optimally in the welfare of the community.

Keywords: Optimization, SOP, BUMDes, Village Own-Source Revenue

Abstrak

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat diperlukan sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa dalam menjamin kebutuhan warganya. Upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut yakni melalui BUMDes. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui upaya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui Standar Operasional yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana pemerolehan data dilakukan secara langsung melalui pengamatan, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi kegiatan. Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat efektivitas BUMDes sehingga upaya yang dapat diaplikasikan yakni dengan memaksimalkan Standar Operasional Prosedur dan diiringi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, menyiapkan strategi pemasaran yang baik, meningkatkan sistem manajemen yang efektif sehingga BUMDes dapat berjalan optimal dalam mensejahterakan masyarakat.

Received Desember 30, 2022; Revised Januari 02, 2023; Februari 02, 2023

* Muhammad Frengki, 20071010085@student.upnjatim.ac.id

Kata kunci: Optimalisasi, SOP, BUMDes, Pendapatan Asli Desa

I. PENDAHULUAN

Suatu desa pada dasarnya memiliki cita-cita untuk bisa mandiri dalam membangun perekonomian desanya dengan tujuan agar dapat meningkatkan nilai kesejahteraan, memperbaiki kualitas hidup, seperti pendidikan, sosial, maupun kesehatan masyarakatnya. Pembangunan desa secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan dengan tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya.¹

Desa dapat mengupayakan usaha untuk dapat mandiri dalam hal membangun desanya yaitu melalui pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes, mengacu pada Pasal 1 PP Nomor 11 Tahun 2021², merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama dengan desa-desa lain untuk mengelola usaha maupun memanfaatkan suatu aset yang dimiliki oleh desa dan juga mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan serta usaha-usaha lain dengan tujuan agar taraf hidup masyarakat desa meningkat. Hal ini dapat dipahami bahwa usaha BUMDes yang dapat dijalankan yaitu kegiatan di bidang perekonomian maupun pelayanan jasa. Apabila mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014, modal BUMDes, baik seluruh maupun sebagian besar bersumber dari milik Desa yang mana melalui penyertaan secara langsung maupun tidak langsung daripada kekayaan Desa.

Tujuan utama dibentuknya BUMDes tentu yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun tujuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 huruf c PP Nomor 11 Tahun 2021 yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pendapat asli suatu Desa dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi Desa. Pembentukan BUMDes sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita desa diperlukan partisipasi aktif semua pihak, terutama pemerintah desa dalam hal pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa.

¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

² Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623

Desa Dongko terletak di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Berada di lokasi yang strategis di pusat administrasi Kecamatan Dongko sehingga Desa Dongko juga merupakan pusat perekonomian dimana perputaran uang juga tinggi. Desa Dongko memiliki BUMDes, yakni BUMDes “Sumber Lancar” yang didirikan pada tahun 2018 yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 dengan beberapa unit usaha, yaitu penyewaan scaffolding, molen, tenda hajatan, dan tenda pedagang; pembayaran pajak kendaraan; unit BRILink; toko ATK; dan usaha perdagangan³. Total unit usaha yang dimiliki yaitu sebanyak 5 (lima) unit usaha. Dengan adanya unit-unit usaha yang dijalankan diharapkan kegiatan BUMDes dapat membantu perekonomian desa terutama dalam hal pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa yang diterima Desa Dongko tahun 2021 adalah senilai Rp.114.100.000,00- (Pemerintah Desa Dongko, 2022)⁴

Mengacu pada penjelesan dari BPS, pendapatan asli desa yaitu sumber penerimaan desa dari pelbagai usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dengan maksud untuk memenuhi pembiayaan pembangunan. Penerimaan pendapatan asli desa tersebut seperti dari hasil kas yang dimiliki desa, pasar yang diurus oleh desa, bidang kepariwisataan, persewaan gedung atas kepemilikan desa, swadaya maupun dari kontribusi masyarakat serta kekayaan desa lainnya.

Dalam meningkatkan pendapatan asli desa, pengelolaan BUMDes memerlukan upaya yang dapat mendongkrak laba BUMDes, terutama dalam melihat problematika, kelemahan serta potensi apa saja yang dapat dikembangkan. Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya agar suatu badan usaha dapat meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan guna kemakmuran bersama. Standar Operasional Prosedur diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMDes.

Menurut (Wibowo, 2010)⁵ menjelaskan yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur merupakan pakem kegiatan yang diharuskan untuk dilakukan dengan runut agar suatu pekerjaan dapat terselesaikan yang mana apabila ditaati dengan baik maka akan membawa hasil, seperti lancarnya koordinasi, dan kejelasan *jobdesk*

³ Profil BUMDes “Sumber Lancar” Dongko 2022

⁴ Administrator, (2022). APBDes Dongko Tahun 2022, <https://dongko-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/99-Infografis-APBDes-Tahun-2022-Desa-Dongko>

⁵ Wibowo, (2010). Manajemen Kerja. Jakarta: Rajawali Press

pegawai. Standar Operasional Prosedur memiliki beberapa kriteria, yakni tepat guna dan ringkas waktu serta terbuka terhadap perubahan, yang artinya dapat diubah apabila membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Tujuan daripada penulisan ini yakni untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh BUMDes “Sumber Lancar” dalam meningkatkan laba perusahaan guna meningkatkan pendapat asli desa melalui Standar Operasional Prosedur. Harapannya bahwa dengan adanya kajian ini dapat meningkatkan kinerja BUMDes sehingga berimplikasi terhadap meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Dongko.

II. METODE

Penelitian dilakukan di wilayah Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan *descriptive approachment* (pendekatan secara deskriptif) yang mana fokus penelitian ini yakni upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa agar pendapatan asli desa Dongko mengalami peningkatan.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti suatu objek secara alamiah yang mana bergantung pada peneliti sebagai instrumen kunci dalam pemerolehan makna. Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi serta pengamatan atau observasi secara langsung dimana peneliti terjun ke lokasi penelitian, yakni Desa Dongko.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Informasi Umum BUMDes “Sumber Lancar”

Pada tahapan awal dilakukan pengidentifikasian dan pengumpulan data, klasifikasi data serta analisis data yang telah diperoleh. Pengumpulan data berupa informasi umum mengenai objek penelitian yakni BUMDes “Sumber Lancar”. Sementara pada tahap identifikasi internal dan eksternal dilakukan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi, mencari kelemahan, serta menggali potensi yang dimiliki. Pada tahap ini dilakukan diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion) dengan mewawancarai pengurus BUMDes, yakni Bapak Hartono selaku Direktur atau Ketua, Bapak Winarno selaku Bendahara, dan juga Bapak Kresna

Dwi Panjalu selaku Sekretaris. Informasi umum terkait BUMDes “Sumber Lancar” sebagai berikut

Gambar 1 Struktur Kepengurusan BUMDes Sumber Lancar Desa Dongko



Tabel 1. Penyertaan Modal BUMDes “Sumber Lancar”

Asal Modal	Besaran Modal
Modal Awal	Rp283.716.804,80
Penyertaan Modal Desa	Rp270.935.564,00
Penyertaan Modal Masyarakat	-

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 2. Identifikasi Permasalahan Internal dan Eksternal

Permasalahan Internal	Permasalahan Eksternal
Kesulitan dalam menentukan standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Belum adanya mitra bisnis (penanaman modal)
Ketidaktahuan tentang cara membuat SOP yang sesuai kebutuhan BUMDes	-
Masalah dalam menentukan siapa yang harus terlibat dalam proses pembentukan SOP	-
Ketidakmampuan mengelola SOP yang telah dibuat, termasuk dalam pembaharuan SOP	-
Masalah dalam mengukur efektivitas SOP yang telah dibuat	-

Sumber: diolah oleh penulis

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal, selanjutnya yakni mencari strategi pemecahan masalah yang berupa perancangan Standar Operasional Prosedur dikarenakan BUMDes “Sumber Lancar” belum mempunyai SOP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pijakan awal dalam pengoperasian BUMDes. Seperti halnya dalam pengidentifikasian masalah, dilakukan wawancara terhadap pengurus BUMDes untuk menganalisis hal apa saja yang perlu dimasukkan dalam perancangan SOP yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes.

Gambar 2 Pertemuan dengan Pengurus BUMDes untuk Membahas Rancangan SOP



Dari hasil diskusi dan wawancara tersebut didapat hal apa saja yang akan dimasukkan dalam rancangan Standar Operasional Prosedur, yakni meliputi SOP mengenai Pelaksanaan Unit Usaha BUMDes “Sumber Lancar”; dan SOP Struktural, Fungsional, dan Administrasi Kerja.

B. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Unit Usaha BUMDes “Sumber Lancar”

Dalam SOP Unit Usaha memuat ketentuan produk yang ditawarkan oleh BUMDes, seperti penyewaan scaffolding, tenda untuk pedagang pasar; unit BRILink; unit pembayaran pajak kendaraan bermotor; unit toko ATK. Ketentuan tersebut meliputi harga sewa atau harga layanan, ketentuan jaminan risiko, serta prosedur pelayanan.

Tabel 3. Unit Usaha Scaffolding

No.	Produk Usaha	Sewa	Harga
1.	Scaffolding	1 hari	Rp5000,00
2.	Scaffolding	1 bulan	Rp75.000,00
3.	Aksesoris Scaffolding:		
	Uhead	1 buah	Rp1000,00
	Jetbes	1 buah	Rp1000,00
	Catwalk	1 hari	Rp2.500,00
	Catwalk	1 bulan	Rp37.500,00

Sumber: SOP BUMDes “Sumber Lancar” Desa Dongko (disunting seperlunya)

Tabel 4. Unit Usaha Tenda untuk Pedagang

No.	Produk Usaha	Sewa	Harga
1.	Tenda untuk Pedagang	1 hari	Rp10.000,00 Catatan: Sewa: Rp5000,00 Biaya bongkar pasang: Rp5000,00

Sumber: SOP BUMDes “Sumber Lancar” Desa Dongko (disunting seperlunya)

Sementara untuk unit usaha BRILink, unit usaha Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan unit usaha Toko ATK memuat prosedur pelayanan pelanggan secara umum dan pelaporan pertanggungjawaban.

C. Standar Operasional Prosedur Struktural, Fungsional, dan Administrasi Kerja BUMDes “Sumber Lancar”

Bagian ini memuat tugas struktural Pejabat BUMDes seperti Pengawas, Penasehat, Direktur, Sekretaris, dan juga Bendahara. Selain itu di bagian ini juga mengatur mengenai Jam Kerja Operasional BUMDes; Rencana Kerja; Perekrutan dan Perjanjian Kerja; Hak atas Honor Pengurus/Karyawan; Sistem Pembayaran; Pelaporan; Evaluasi Kinerja Pengurus; Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dan Pergeseran Jabatan; Kategori Pelanggaran; Kategori Pelanggaran Prosedur; Sanksi atas Pelanggaran; dan Kategori Kinerja Rendah.

Pengaturan mengenai tugas struktural dan fungsional serta administrasi dalam suatu BUMDes penting dilakukan untuk menjamin adanya kepastian tugas pokok yang harus dilakukan oleh masing-masing pengurus BUMDes sehingga tidak adanya tumpang tindih pekerjaan. Selain daripada itu, pengaturan semacam ini diperlukan untuk evaluasi atau penilaian dan juga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing pengurus sehingga BUMDes dapat menilai apa saja yang dapat ditingkatkan untuk kedepannya.

Dengan meningkatnya kinerja badan usaha milik desa, maka masyarakat desa akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, hal ini berimplikasi terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes, ada beberapa langkah yang dapat diupayakan:

1. Menyediakan SDM yang kompeten dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Tenaga kerja yang kompeten akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMDes;
2. Menyiapkan langkah-langkah pemasaran yang tepat. BUMDes harus dapat mencari target pasar yang sesuai (efektivitas) dengan produk yang dijual, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan;
3. Menyiapkan sistem manajemen yang baik. Manajemen yang baik akan membantu memperlancar kegiatan usaha, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi;
4. Menyiapkan modal yang cukup untuk membiayai kegiatan usaha. Modal yang cukup akan membantu memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan produktivitas badan usaha milik desa;
5. Menyiapkan sistem finansial yang baik. Sistem finansial yang baik dapat membantu mengelola keuangan badan usaha milik desa dengan baik, sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMDes dapat mengoptimalkan kinerjanya serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat desa sehingga berimplikasi terhadap sumber pendapatan asli desa. Selain itu, optimalisasi kinerja BUMDes juga akan membantu kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

IV. KESIMPULAN

Fungsi standar operasional prosedur merupakan panduan yang dibuat oleh BUMDes untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam menjalankan kegiatan operasional. Fungsi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibentuk dan yang telah ditetapkan. Fungsi ini juga bertujuan untuk membantu BUMDes dalam meningkatkan efektivitas maupun efisiensi untuk mengelola potensi sumber daya yang ada, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan berdasarkan prinsip dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila SOP telah dijalankan dengan baik, maka secara kinerja akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMDes dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga dapat memperbaiki sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan kualitas kesejahteraan. Selain itu, dengan

menjalankan SOP yang benar, BUMDes juga dapat lebih terorganisir dan terstruktur sehingga dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan dan SDM di desa tersebut. Dapat disimpulkan, penting bagi BUMDes “Sumber Lancar” Desa Dongko untuk selalu memperhatikan dan menjalankan SOP dengan benar agar dapat mencapai kinerja optimal. Dengan demikian, fungsi SOP merupakan salah satu aspek penting untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, khususnya kepada LPPM yang mana telah memberikan kesempatan dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata Tematik MBKM di Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek sehingga penulis memiliki berkesempatan untuk mengabdikan kepada masyarakat Desa Dongko secara langsung. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Dongko, Bapak Marni beserta para Pejabat Desa Dongko atas dukungan dan bimbingannya selama berada di Desa Dongko. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., MKn., selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam penulisan ini.

REFERENSI

Buku:

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Tambunan, R. M. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur*. Jakarta: Maeistas Publishing.

Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.

Non Buku:

Indrawati, L. R., Fitri, G., Susilo, A., Sunaningsih, S. N., & Siharis, A. K. (2021). *Optimalisasi Fungsi BUMdes Melalui Penguatan Manajemen dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa Wisata Ngargogondo Borobudur*. 1(2), 65–73.

Kosasih, N. (2008). Analisis Pengaruh Standar Operasional Prosedur terhadap kinerja Pegawai front office Surabaya Plaza Hotel. *Jurnal Ekonomi Manajemen Jan-April*, 18-24.

Nugraheni, R., Prihatini, A. E., & Budiatmo, A. (2014). Pengaruh Standar Operasional Prosedur Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pramuniaga Pasaraya Sriratu Pemuda Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(2), 187–195. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/5194>

Risal, S., & Saputra, R. W. (2022). *Pengembangan Skala Usaha Bumdes Tritunggal Mandiri melalui Pemanfaatan Potensi Desa Martadah Baru Kabupaten Tanah Laut Business Scale Development of Independent Tritunggal Bumdes through Utilization of the Potential of Martadah Baru Village , Tanah Laut Regency*. 1(3), 269–282.

Susilowati, N., Anisykurlillah, I., Asrodi, M., & Mahmud, A. (2021). *Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng*. 25(2), 175–180.

Widiastuti, H., Manuhara, W., & Rahman, E. (2019). *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*. 22(2), 257–288.

Queen, V., & Widi, A. (2016). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)*. 5(2), 59–63.